



Katalog BPS: 7102025.1704

Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Kaur 2014

<http://kaurkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KAUR**

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN KAUR
2014**

<http://kaurkab.bps.go.id>

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KAUR 2014

Nomor Publikasi : 1704.1504
Katalog BPS : 7102025.1704
Ukuran Buku : 25,0 cm x 17,6 cm
Jumlah Halaman : vii + 59 halaman

Naskah :
Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Kaur

Desain kulit :
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Kabupaten Kaur

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

Kata Sambutan

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada tahun 2015 ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur dapat menerbitkan publikasi **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kaur 2014** dengan metode baru.

Sehubungan dengan penerbitan publikasi ini, atas nama kepala BPS Kabupaten Kaur, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang telah berupaya menyusun dan menyajikan data dan analisis **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kaur** tahun 2014 dengan tepat waktu.

Semoga publikasi ini memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur maupun stakeholder yang lain untuk dalam merencanakan, monitoring dan evaluasi program-program pembangunan di Kabupaten Kaur.

Kami menyadari bahwa penyajian publikasi ini masih belum optimal. Oleh karena itu, saran dan kritik dari para pengguna data akan kami terima dengan senang hati demi perbaikan dan penyempurnaan publikasi berikutnya. Harapan kami semoga publikasi ini dapat memenuhi harapan dan bermanfaat bagi kita semua.

Bintuhan, Oktober 2015
Kepala BPS Kabupaten Kaur,

Ir. A R B I

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar Kepala BPS Kabupaten Kaur	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan dan Kegunaan.....	4
1.3. Jenis dan Sumber Data	6
1.4. Ruang Lingkup	6
1.5. Sistematika Penyajian	7
BAB II METODOLOGI	9
2.1. Indikator	12
2.2. Metode Analisis	13
2.3. Konsep dan Definisi	19
BAB III KONDISI OBJEKTIF PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KAUR.....	21
3.1. Kependudukan.....	24
3.2. Pembangunan Pendidikan	26
3.3. Pembangunan Kesehatan	27
3.4. Kesehatan Lingkungan	31
BAB IV KEMAJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KAUR TAHUN 2014	35
BAB V PERBANDINGAN IPM KABUPATEN KAUR DENGAN KABUPATEN LAIN	41
5.1. Angka Harapan Hidup	44
5.2. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah	46
5.3. Daya Beli.....	49
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	52
6.1. Kesimpulan.....	53
6.2. Saran.....	54
LAMPIRAN	56

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1. Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Komponen IPM	17
Tabel 2. Klasifikasi Status Pembangunan Manusia	18
Tabel 3. Luas Wilayah, JumlahPenduduk, dan Kepadatan Penduduk	26
Tabel 4. Indikator Kesehatan Lingkungan	32
Tabel 5. Diagram Analisis Situasi Pencapaian Pembangunan Manusia.....	38
Tabel 6. Indikator IPM dan Nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu	59

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1. Komposisi Penduduk Kabupaten Kaur Menurut Kelompok Umur 2014.....	25
Gambar 2. Pencapaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Kaur Tahun 2009-2014	29
Gambar 3. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kaur Tahun 2009-2014	39
Gambar 4. IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2014	44
Gambar 5. AHH Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2014.....	46
Gambar 6. HLS Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2014	47
Gambar 7. RLS Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2014.....	48
Gambar 8. Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2014 (Rp.000)	49

<http://kaurkab.bps.go.id>

Bab 1

Pendahuluan

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator keberhasilan pembangunan manusia yang telah distandarkan secara internasional.

Menghadapi era globalisasi diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu bersaing secara kompetitif. Untuk itu, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan yang terpusat pada manusia. Hal tersebut sejalan dengan konsep pembangunan manusia yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan. Agar konsep pembangunan manusia dapat diterjemahkan dengan mudah dalam pengambilan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau secara jelas. *United Nation Development Program (UNDP)* memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran pembangunan manusia. Indeks tersebut merupakan indikator keberhasilan pembangunan manusia yang telah distandarkan secara internasional. Indonesia sendiri telah menyajikan IPM hingga level kabupaten sejak tahun 2001.

Mengingat arti penting pembangunan manusia, Kabupaten Kaur sebagai salah satu kabupaten yang relatif berusia muda (terbentuk tahun 2003) ikut memperhatikan perkembangan pembangunan manusia di daerahnya, sebagaimana tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, IPM mempunyai arti dan fungsi yang sangat luas, diantaranya :

- (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas hidup manusia. IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi, yaitu umur

panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

- (2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- (3) IPM digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi proses pembangunan sumber daya manusianya.
- (4) IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- (5) Secara berkala, data IPM digunakan sebagai salah satu indikator dalam penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU).
- (6) IPM harus digunakan dengan hati-hati, meskipun indeks-indeks tersebut memberikan petunjuk umum tentang kebutuhan-kebutuhan dan prioritas-prioritas pembangunan manusia. Indeks tersebut masih perlu dilengkapi dengan informasi-informasi kuantitatif dan kualitatif yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penghitungan IPM meliputi tiga aspek kehidupan yang berfokus pada peningkatan kualitas penduduk sebagai subjek pembangunan nasional. Ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fisik

Dari aspek fisik bertujuan untuk mengetahui kesehatan penduduk yang diukur dengan angka harapan hidup.

2. Mental

Dari aspek mental bertujuan untuk mengetahui pendidikan penduduk yang diukur dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah.

3. Kesejahteraan Ekonomi

Dari aspek kesejahteraan ekonomi bertujuan untuk mengetahui daya beli penduduk yang diukur dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Tujuan penghitungan IPM meliputi tiga aspek kehidupan yang berfokus pada peningkatan kualitas penduduk sebagai subjek pembangunan nasional. Ketiga aspek tersebut adalah fisik, mental, dan kesejahteraan ekonomi.

Sebagai sebuah indikator, penghitungan IPM bertujuan pula untuk alat evaluasi sekaligus dasar perencanaan pembangunan. Di era otonomi daerah, perencanaan pembangunan sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah Daerah, termasuk diantaranya adalah peningkatan pembangunan manusia. Melalui analisis IPM Kabupaten Kaur ini, diharapkan dapat membantu pengemban amanah dalam menentukan arah kebijakannya, antara lain:

- (a) Sebagai indikator awal untuk memahami bahwa pembangunan manusia mempunyai cakupan yang luas. Apa yang diungkapkan oleh IPM sesungguhnya memiliki kaitan implisit dengan persoalan kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, gizi anak, kesetaraan gender, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, upaya peningkatan IPM bukan hanya berfokus pada tiga aspek semata, tetapi harus melalui perencanaan yang komprehensif.
- (b) Angka IPM melalui tiga komponennya memberikan indikasi tingkat ketertinggalan (*shortfall*) atas pembangunan manusia, apakah di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonominya. Berdasarkan hal tersebut dapat digunakan untuk menyusun prioritas dan penciptaan kondisi yang lebih baik untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

- (c) Melalui besaran IPM, dapat disusun penggolongan daerah menurut kualitas pembangunan manusianya. Dengan demikian, dapat digunakan untuk memetakan posisi suatu daerah dibanding daerah lain.

1.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penghitungan IPM adalah :data fertilitas, data pendidikan, dan data pengeluaran konsumsi perkapita.

Sumber data yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia utamanya data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) disamping Sensus Penduduk (SP2000) dan Survei Antar Sensus (SUPAS) 2005. Sedangkan data yang digunakan untuk menyusun IPM 2014 meliputi Susenas Kor 2014, Susenas Panel Maret 2014, dan IHK 2014. Susenas Kor 2014 digunakan untuk menghitung indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk Angka Harapan Hidup (e_0) dihitung menggunakan *modelling* berdasarkan data SP2000, SUPAS 2005, dan Susenas 2013 dan Susenas 2014. Sedangkan Susenas Panel Maret 2014 digunakan untuk menghitung daya beli yang didasarkan pada 27 komoditi. Indeks Harga Konsumen (IHK) 2014 digunakan untuk *deflate* harga implisit dari 27 komoditi pada Susenas Panel Maret 2014 untuk memperoleh harga pada kondisi bulan Juni tahun 2014.

1.4 Ruang Lingkup

Mengingat luasnya pembahasan mengenai pembangunan manusia, maka analisis mengenai IPM Kabupaten Kaur ini dibatasi dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- (1) Analisis dibatasi pada data tahun 2014 dengan dengan metode baru.
- (2) Fokus analisis adalah pada tiga komponen IPM yaitu Angka Harapan Hidup (e_0), Harapan Lama Sekolah

(HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta Paritas Daya Beli.

- (3) Untuk melihat posisi pembangunan manusia di Kabupaten Kaur dilakukan perbandingan dengan IPM Provinsi Bengkulu dan kabupaten lain dalam Provinsi Bengkulu.

1.5 Sistematika Penyajian

Penyajian buku Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014 ini terbagi ke dalam lima bab sebagai berikut :

Bab 1, Pendahuluan, menyajikan :

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Tujuan dan Kegunaan
- 1.3 Jenis dan sumber data
- 1.4 Ruang lingkup
- 1.5 Sistematika penyajian

Bab 2, Metodologi, menyajikan :

- 2.1 Indikator
- 2.2 Metode analisis
- 2.3 Konsep dan definisi

Bab 3, Kondisi Objektif Pembangunan Manusia di Kabupaten Kaur, menyajikan :

- 3.1 Kependudukan
- 3.2 Pembangunan Pendidikan
- 3.3 Pembangunan Kesehatan
- 3.4 Kesehatan Lingkungan

Bab 4, Pencapaian IPM Kabupaten Kaur Tahun 2014,

Bab 5, Perbandingan IPM Kabupaten Kaur dengan Kabupaten lain di Provinsi Bengkulu, menyajikan :

- 5.1 Indeks Pembangunan Manusia
- 5.2 Angka Harapan hidup
- 5.3 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

5.4 Pengeluaran perkapita Riil Disesuaikan

Bab 6, Kesimpulan dan saran, menyajikan :

6.1 Kesimpulan

6.2 Saran

<http://kaurkab.bps.go.id>

<http://kaurkab.bps.go.id>

Bab 2

Metodologi

METODOLOGI

Untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah digunakan suatu indeks komposit, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Pembangunan manusia menurut definisi UNDP (1990) merupakan model pembangunan yang ditujukan untuk memperluas pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Pemberdayaan penduduk tersebut dapat dicapai melalui upaya yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia, yaitu meningkatkan derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan agar dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya dan politik. Upaya terhadap peningkatan kemampuan dasar manusia berarti juga pemenuhan akan hak asasi, yaitu hak untuk menikmati usia yang lebih panjang, hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk dapat hidup layak.

Untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah digunakan suatu indeks komposit, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*. Walaupun indikator tersebut tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun setidaknya mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar manusia. Kemampuan dasar tersebut adalah umur panjang dan sehat yang diukur dengan Angka Harapan Hidup waktu lahir, pengetahuan yang diukur dengan angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, serta standar hidup layak yang diukur dengan kemampuan daya beli.

Dikatakan indeks komposit karena dibentuk dari 3 komponen tersebut : Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Daya Beli Penduduk.

2.1 Indikator

Indikator merupakan petunjuk yang memberikan indikasi tentang suatu keadaan, atau dalam definisi lain sebagai variabel penolong dalam mengukur perubahan.

Indikator merupakan petunjuk yang memberikan indikasi tentang suatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut. Dalam definisi lain, indikator dapat dikatakan sebagai variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung. Indikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan lain :

1. Sahih (valid), indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya akan diukur oleh indikator tersebut.
2. Obyektif, untuk hal yang sama indikator harus memberikan hasil yang sama pula, walaupun dipakai oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda.
3. Sensitif, perubahan yang kecil mampu terdeteksi oleh indikator.
4. Spesifik, indikator hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud

Menurut sifatnya indikator dapat bersifat tunggal dan jamak. Menurut jenisnya indikator terdiri atas indikator input, indikator proses, dan indikator output.

Namun demikian perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-benar dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat.

Indikator bisa bersifat tunggal (indikator tunggal) yang isinya terdiri dari satu indikator, seperti Angka Kematian Bayi (AKB), dan bersifat jamak (indikator komposit) yang merupakan gabungan dari beberapa indikator, seperti Indeks Mutu Hidup (IMH) yang merupakan gabungan dari tiga jenis indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Kematian

Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup dari anak usia satu tahun ($AHHe_1$).

Menurut jenisnya indikator dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Indikator input, yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti rasio murid-guru, rasio murid-kelas, rasio penduduk-dokter, rasio penduduk-puskesmas dan lain sebagainya.
2. Indikator proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti : Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-rata Jumlah Jam Kerja, Rata-rata Jumlah Kunjungan ke Puskesmas, Persentase Proses Kelahiran yang Ditolong oleh Dukun.
3. Indikator Output/Outcome, yang menggambarkan bagaimana hasil (*output*) dari suatu program kegiatan telah berjalan seperti : persentase penduduk dengan pendidikan SMU/setara ke atas, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH) dan lain-lain.

2.2 Metode Analisis

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari Indeks Harapan Hidup (e_0), Indeks pendidikan (harapan lama sekolah ditambah dengan rata-rata lama sekolah), dan Indeks Daya Beli Penduduk (standar hidup layak). Penjelasan mengenai indeks-indeks tersebut sebagai berikut :

a. Komponen Usia Hidup (*Longevity*)

Usia hidup (*longevity*) diukur dengan indeks Angka Harapan Hidup. Sebenarnya cukup banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup. Namun dengan

mempertimbangkan ketersediaan data secara umum, maka UNDP memilih indikator angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) sebagai salah satu komponen untuk penghitungan IPM. Untuk menghitung angka harapan hidup tersebut digunakan metode tidak langsung dengan menggunakan dua macam data dasar, yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Sumber data yang dapat digunakan untuk penghitungan angka harapan hidup ini adalah dari Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Setelah diperoleh angka harapan hidup waktu lahir, selanjutnya dihitung indeksnya dengan membandingkan angka tersebut terhadap angka yang sudah distandarkan (dalam hal ini UNDP telah menetapkan nilai minimum dan maksimum untuk angka harapan hidup, yaitu masing-masing 25 tahun dan 85 tahun, lihat tabel 1).

b. Komponen Pengetahuan (*Knowledge*)

Sementara itu, komponen pengetahuan untuk IPM tahun 2014 diukur menggunakan dua variabel, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya menggunakan variabel angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Indikator harapan lama sekolah penduduk dewasa, dapat diolah dari data Susenas Kor. Sedangkan untuk memperoleh angka rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling, MYS*) dihitung dengan mengolah dua variabel secara simultan, yaitu : tingkat/kelas yang sedang/ pernah diduduki dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Angka-angka tersebut juga diolah dari angka Susenas Kor. Penghitungan rata-rata lama sekolah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, dihitung lama sekolah untuk masing-masing individu dengan

menggunakan pola hubungan antar variabel. Tahap selanjutnya dihitung rata-rata lama sekolah.

c. Komponen Standar Hidup Layak (*Decent Living*)

Untuk mengukur standar hidup layak, data dasar PDRB per kapita tidak dapat digunakan karena bukan ukuran yang peka untuk mengukur kemampuan daya beli penduduk. Untuk itu penghitungan IPM menggunakan konsumsi perkapita riil yang telah disesuaikan untuk mengukur kemampuan daya beli penduduk, penggunaannya sendiri sudah merupakan kesepakatan dari UNDP untuk keperluan perbandingan antar wilayah/negara. Sumber data yang digunakan adalah jumlah pengeluaran per kapita yang meliputi konsumsi makanan dan konsumsi non makanan dari Susenas Kor dan Modul.

Penghitungan indikator konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut :

- a. Menghitung pengeluaran konsumsi perkapita dari Susenas Modul (=A)
- b. Mendefinisikan nilai A dengan IHK Kabupaten Kaur yang sesuai (=B)
- c. Menghitung daya beli per unit (=PPP/unit)

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus :

$$PPP/Unit = \frac{\sum_j E_{i,(j)}}{\sum_j (P_{(x,j)} \cdot Q_{(i,j)})}$$

dimana,

$E_{(i,j)}$ = pengeluaran untuk komoditi j di kabupaten i

$P_{(x,j)}$ = harga komoditi j di Jakarta Selatan

$Q_{(i,j)}$ = jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di Kabupaten i

- d. Membagi nilai B dengan PPP/unit (=C)
- e. Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai marginal utility dari C.

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 C_{(i)}^* &= C_{(i)} && \text{jika } C_{(i)} < Z \\
 &= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{(1/2)} && \text{jika } Z < C_{(i)} < 2Z \\
 &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} && \text{jika } 2Z < C_{(i)} < 3Z \\
 &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Z)^{(1/3)} + 4(C_{(i)} - 3Z)^{(1/4)} && \text{jika } 3Z < C_{(i)} < 4Z
 \end{aligned}$$

dimana,

$C_{(i)}$ = Konsumsi perkapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit

Z = *Threshold* atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan yang dalam laporan ini nilai Z ditetapkan secara *arbiter* sebesar Rp549.500,00 perkapita setahun, atau Rp1.500,00 per kapita per hari.

RUMUS PENGHITUNGAN IPM

Rumus penghitungan IPM Tahun 2014 menggunakan perhitungan geometrik karena dianggap lebih tepat dibanding dengan perhitungan aritmatik seperti tahun-tahun sebelumnya. Adapun rumus perhitungan IPM Tahun 2014 dapat disajikan sebagai :

$$IPM = \sqrt[3]{IndeksX1 \cdot IndeksX2 \cdot IndeksX3}$$

dimana :

X_1 = Indeks Lamanya hidup

$$= \frac{(X_1 - 20)}{(85 - 20)}$$

X_2 = Indeks pendidikan

$$= \frac{1}{2} (\text{Indeks Harapan Lama Sekolah}) + (\text{Indeks Lama Sekolah})$$

$$= \frac{1}{2} \frac{(X_{21} - 0)}{(18 - 0)} + \frac{1}{2} \frac{(X_{22} - 0)}{(15 - 0)}$$

X_3 = Indeks standar hidup layak

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut :

$$\text{Indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})}$$

Dimana :

$X_{(i,j)}$ = indeks komponen ke-i dari daerah j

$X_{(i-\min)}$ = nilai minimum dari X_i

$X_{(i-\max)}$ = nilai maksimum dari X_i

Tabel 1. Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Komponen IPM

Indikator Komponen IPM(= X_i)	Nilai Maks.	Nilai Min.	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	20	Standar UNDP
Harapan Lama Sekolah	18	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	UNDP menggunakan <i>combined gross enrolment ratio</i>
Peneluaran per Kapita disesuaikan	1.007.436 ^{a)} (Rp.)	26.572.352 ^{b)} (Rp.)	UNDP menggunakan PNB riil perkapita yang telah disesuaikan

Catatan :

- a. Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- b. Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Nilai maksimum dan nilai minimum untuk komponen angka harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah sama seperti yang digunakan UNDP dalam menyusun IPM global sebelum tahun 1994, batasan tersebut juga digunakan BPS-UNDP, dengan demikian indeks harapan hidup dan indeks pendidikan memungkinkan untuk dilakukan perbandingan baik tingkat nasional maupun internasional. Nilainya disajikan pada tabel 1.

Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Meningkatnya pembangunan manusia dapat dilihat berdasarkan besaran/skor IPM yang dapat dicapai. Berdasarkan klasifikasi tersebut tingkat pencapaian IPM dibedakan menjadi empat kategori sebagai mana tercatum dalam tabel berikut.

Tabel 2. Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia)
< 60	Rendah
$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

2.3 Konsep dan Definisi

Angka Harapan Hidup pada Waktu Lahir (e_0)	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
Harapan Lama Sekolah	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang
Paritas Daya Beli (<i>Purchasing Power Parity = PPP</i>)	Indikator ekonomi yang digunakan untuk melakukan perbandingan harga-harga riil antar wilayah provinsi dan antar kabupate/kota. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di suatu (provinsi/kabupaten) memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil per kapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan formula Atkinson.
Indeks Peluang Hidup	Perbandingan antara selisih angka harapan hidup dengan nilai minimumnya dan selisih nilai maksimum dan minimum angka harapan hidup tersebut.
Indeks Pengetahuan	Penjumlahan antara indeks harapan lama sekolah dengan indeks rata-rata lama sekolah.

Konsumsi Perkapita Pengeluaran perkapita untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Sedangkan bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Scholing = MYS*) Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Reduksi *Shorfall* Mengukur keberhasilan pembangunan manusia dipandang dari jarak antara yang dicapai terhadap kondisi ideal (IPM = 100). Nilai reduksi *shortfall* yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat. Pengukuran ini didasarkan asumsi, laju perubahan tidak bersifat linier, tetapi laju perubahan cenderung melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi.

<http://kaurkab.bps.go.id>

Bab 3

Kondisi Objektif

Pembangunan Manusia di

Kabupaten Kaur

KONDISI OBJEKTIF PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN KAUR

Pembangunan Manusia adalah investasi jangka panjang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Karena itu, perencanaan pembangunan daerah semakin mengarah pada tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bermuara pada peningkatan IPM. Namun perlu disadari bahwa investasi pembangunan manusia tidak dapat bersifat instan dan cepat, dampak positifnya akan dirasakan pada beberapa periode ke depan. Sebagai contoh, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah seperti dimanifestasikan dalam program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, hasilnya akan meningkatkan IPM setelah beberapa tahun berikutnya. Investasi pembangunan manusia memang merupakan pembangunan jangka panjang.

Program peningkatan IPM harus bersifat holistik pada segenap unsur kesejahteraan manusia.

Di satu sisi, secara formulasi IPM hanyalah merefleksikan tiga komponen yang menjadi penyusunnya. Namun sesungguhnya banyak determinan yang harus diketahui dibalik ketiga komponen IPM tersebut. Misalnya, Angka Harapan Hidup (AHH). Dalam konsep demografis, AHH adalah fungsi matematis dari Angka Kematian Bayi (AKB). Dengan demikian program pembangunan, seharusnya difokuskan pada determinan di belakang AKB seperti akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, kesadaran kesehatan keluarga, dan sebagainya. Dengan kata lain, program pembangunan untuk meningkatkan IPM tidak semata intervensi langsung terhadap komponen IPM, tetapi harus

bersifat holistik dan menyeluruh pada segenap unsur kesejahteraan manusia.

Berkaitan dengan itu, pada paparan berikut akan diuraikan bagaimana status pembangunan manusia di Kabupaten Kaur pada tahun 2014, karena berdasarkan kondisi obyektif inilah yang akan menentukan pencapaian IPM pada masa-masa yang akan datang.

3.1 Kependudukan

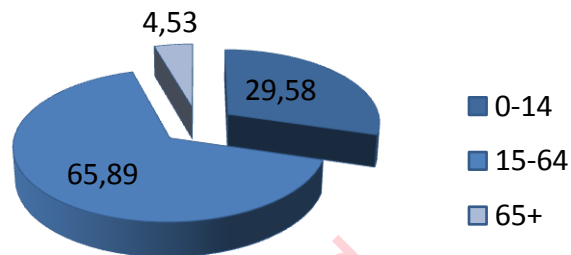
Penduduk Kabupaten Kaur didominasi oleh usia muda dan produktif.

Penduduk Kabupaten Kaur pada tahun 2014 mencapai 114.398 jiwa yang terdiri dari 59.187 laki-laki dan 55.211 perempuan. Dengan wilayah seluas 2.365,00 km² tingkat kepadatan penduduk kabupaten ini sekitar 49 orang per km². Struktur penduduk Kabupaten Kaur masih didominasi oleh usia muda dan produktif. Ini terlihat dari besarnya penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun yang mencapai 75.377 jiwa atau 65,89 persen, sedangkan penduduk yang berusia 0-14 tahun sebanyak 33.842 jiwa atau 29,58 persen, sementara penduduk lanjut usia yang berumur 65 tahun atau lebih jumlahnya 5.179 jiwa atau hanya 4,53 persen. Struktur penduduk tersebut menggambarkan besarnya potensi sumber daya manusia untuk didayagunakan demi kemajuan Kabupaten Kaur.

Penduduk Kabupaten Kaur terkonsentrasi di Kecamatan Kaur Tengah dan Kelam Tengah.

Sedangkan dilihat dari rasio penduduk dan luas wilayahnya, beberapa kecamatan di Kabupaten Kaur relatif memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Adalah Kecamatan Padang Guci Hulu yang merupakan kecamatan dengan penduduk terjarang, yakni 19 jiwa/km². Diikuti Kecamatan Muara Sahung. Sementara kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah kecamatan Kelam Tengah, yakni 176 jiwa/km².

Gambar 1.
Komposisi Penduduk Kabupaten Kaur Menurut Kelompok Umur Tahun 2014



Sumber : Data Susenas BPS Kabupaten Kaur, 2014

Dalam kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia, kepadatan penduduk yang tidak merata yang diikuti dengan disparitas akses sosial dan ekonomi akan mendorong terjadinya migrasi dari wilayah yang kurang padat penduduk ke wilayah yang padat penduduk. Akibatnya dalam jangka panjang daerah asal migrasi menjadi kurang berkembang akibat kekurangan tenaga kerja, sedangkan daerah tujuan migrasi akan mengalami problema sosial. Oleh karena itu, dengan mengetahui konsentrasi kependudukan ini, diharapkan pada masa mendatang dapat direncanakan untuk melakukan pusat-pusat pertumbuhan pada masing-masing sehingga kepadatan penduduk dapat lebih merata dan mampu tumbuh secara seimbang.

Tabel 3.
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kaur Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nasal	16.483	32
2	Maje	13.810	38
3	Kaur Selatan	15.514	167
4	Tetap	5.998	68
5	Kaur Tengah	4.454	169
6	Luas	4.920	39
7	Muara Sahung	5.547	22
8	Kinal	4.355	28
9	Semidang Gumay	5.508	85
10	Tanjung Kemuning	11.008	151
11	Kelam Tengah	6.307	176
12	Kaur Utara	6.558	132
13	Padang Guci Hilir	3.672	32
14	Lunggang Kule	3.365	105
15	Padang Guci Hulu	6.901	19
Jumlah		114.398	48

Sumber : BPS Kabupaten Kaur, 2014

3.2 Pembangunan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Kaur masih relatif rendah, 48,4 persen berpendidikan SD ke bawah.

Pendidikan erat kaitannya dengan kualitas manusia. Berdasarkan data tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Kaur relatif terus mengalami peningkatan. Berdasarkan ijazah tertinggi yang dimiliki, penduduk Kabupaten Kaur berumur 10 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi mayoritas berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah, jumlahnya mencapai 51,18 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding dengan angka tahun sebelumnya. Sementara itu, 19,53 persen berpendidikan Sekolah Menengah atas (SMP), 22,72 persen berpendidikan Sekolah Menengah atas (SMA) dan 6,57 persen yang berpendidikan lebih tinggi dari SMA. Fakta ini menunjukkan, bahwa meskipun ada perbaikan pendidikan

namun masih banyak ruang yang harus terus ditingkatkan dan tentunya memerlukan waktu dan perhatian yang lebih serius.

Program Wajib Belajar 9 tahun belum sepenuhnya tercapai, rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Kaur hanya 7,90 Tahun.

Rendahnya tingkat pendidikan berkaitan dengan rendahnya partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 2014, angka partisipasi murni pada anak umur 7-12 tahun mencapai 98,62 persen. Tetapi pada anak umur 13-15 tahun, yang merupakan usia anak sekolah tingkat SMP, angka partisipasi murni pada kelompok umur ini 83,97 persen. Pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), atau pada kelompok umur 16-18 tahun, angka partisipasi murni lebih rendah lagi, yakni hanya 63,97 persen. Sementara itu angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kaur tahun 2013 sebesar 7,90 persen. Kondisi ini merupakan tantangan bagi jajaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kaur untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Bila mengacu pada program wajib belajar 9 tahun, terlihat bahwa program ini belum tercapai sepenuhnya.

3.3 Pembangunan Kesehatan

Faktor kesehatan menjadi satu dari tiga indikator penting penunjang pembangunan manusia karena bila daya tahan tubuhnya baik maka tingkat produktivitas manusia secara langsung bisa tergali dengan optimal. Pada saat sehat orang dapat menjalankan aktivitas seperti bekerja, bersekolah, mengurus rumahtangga, berolah raga, maupun menjalankan aktivitas lainnya lebih baik dibandingkan saat kondisi tubuhnya sedang sakit.

Departemen Kesehatan, 2003, mencanangkan visi pembangunan kesehatan yaitu tercapainya penduduk dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta

memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Visi pembangunan ini merupakan cita-cita reformasi bidang kesehatan yang diangkat sebagai bagian dari pembangunan manusia secara keseluruhan selain pembangunan bidang ekonomi dan pendidikan.

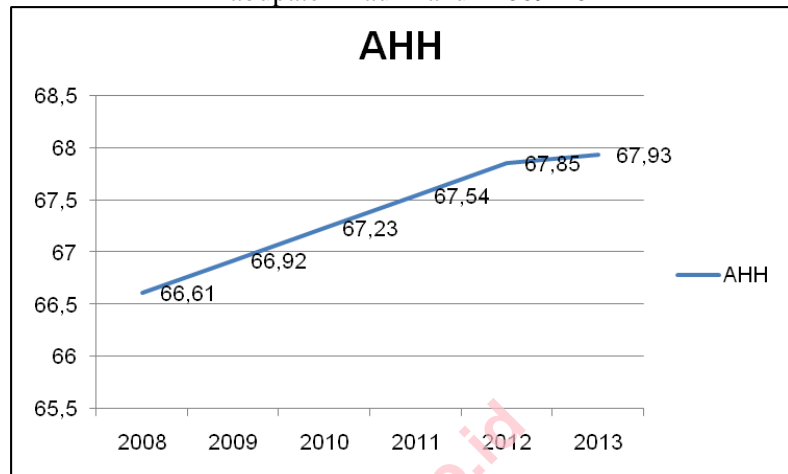
Di tingkat kabupaten, visi yang dicanangkan oleh Departemen Kesehatan tersebut, menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan setempat untuk mewujudkannya antara lain melalui peningkatan pengaturan dan fasilitas penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan; peningkatan pemberdayaan potensi sumber daya kesehatan; peningkatan profesionalitas dan pendayagunaan aparatur kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; serta peningkatan kualitas penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan masyarakat.

Salah satu indikator meningkatnya pembangunan kesehatan adalah pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH). Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Kaur setiap tahun senantiasa meningkat. Pada tahun 2013, AHH di kabupaten ini tercatat sebesar 67,93 tahun dan pada tahun 2014 telah mencapai 67,93 tahun.

*Angka Harapan
Hidup (AHH)
penduduk Kabupaten
Kaur meningkat setiap
tahun.*

Gambar 2.

Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Kaur Tahun 2009-2014



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan fungsi matematis dari Angka Kematian Bayi (AKB). Panjangnya usia hidup secara negatif berhubungan dengan rendahnya angka kematian (bayi lahir mati, kematian bayi bawah 1 tahun, kematian anak di bawah lima tahun dan kematian ibu) dan tingginya angka kesehatan. Makin tinggi angka kesehatan menyebabkan makin rendahnya angka kematian sehingga memperbesar harapan untuk hidup. Dapat dikatakan bahwa meningkatnya AHH Kabupaten Kaur merupakan gambaran adanya penurunan AKB. Penurunan AKB berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah lamanya bayi disusui, penolong kelahiran, pendidikan kaum perempuan, perilaku hidup sehat, dan kemudahan dan keterjangkauan sarana kesehatan.

Angka kematian bayi baru lahir terutama disebabkan oleh antara lain infeksi dan berat bayi lahir rendah. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan kondisi kehamilan, pertolongan persalinan yang aman, dan perawatan bayi baru lahir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kelahiran yang

Sebanyak 14,97 persen persalinan bayi di Kabupaten Kaur masih dibantu oleh tenaga nonmedis.

ditolong oleh tenaga medis di Kabupaten Kaur selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, persentase kelahiran yang ditolong oleh bidan mencapai 59,11 persen dan pada tahun 2014 telah mencapai 74,59 persen dari total kelahiran.

Belum semua bayi di Kabupaten Kaur diberi ASI. Tercatat masih ada 2,28 persen bayi tidak diberi ASI

Ketahanan tubuh bayi sangat dipengaruhi oleh masukan gizi dan imunisasi yang diberikan. Masukan gizi yang baik untuk bayi berasal dari ASI. Air susu ibu disamping memenuhi kebutuhan akan gizi juga mengandung zat antibodi terhadap penyakit. ASI merupakan sumber zat gizi utama dan paling berperan pada masa-masa pertama anak yang baru lahir hingga usia 2 tahun. Sebagai sumber gizi utama, ASI juga mengandung beberapa *nutrien* khusus bagi pertumbuhan otak bayi, seperti *taurin*, *laktosa*, *omega-3 asam linoleat alfa*, dan asam lemak ikatan panjang antara lain DHA (*Docosahexanoic Acid*) dan AA (*Arachidonic Acid*) yang ke semua *nutrien* tersebut tidak bisa didapat dari susu sapi atau formula. Kalaupun ada itupun hanya dengan komposisi yang sangat sedikit. Berbagai fakta ilmiah membuktikan bayi dapat tumbuh lebih sehat dan cerdas jika diberi ASI secara eksklusif pada 4-6 bulan pertama kehidupannya. Eksklusif artinya adalah pada kurun waktu tersebut bayi hanya mengkonsumsi ASI saja dan tidak diberi tambahan makanan apapun. Namun ternyata tidak semua bayi di Kabupaten Kaur memperoleh ASI. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional menunjukkan bahwa persentase balita yang tidak diberi ASI tahun 2014 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Di Kabupaten Kaur, masih ada 2.28 persen balita yang tidak diberi ASI tahun 2014, sedangkan pada tahun 2013 persentasenya sekitar 2,11 persen.

Pembangunan kesehatan tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur kesehatan serta tenaga medis. Untuk menangani pelayanan kesehatan penduduk Kabupaten Kaur, pada tahun

*Fasilitas Kesehatan
meliputi satu RSU, 16
Puskesmas.*

2013 terdapat satu unit Rumah Sakit Umum dan 16 Puskesmas. Setiap kecamatan telah dilayani oleh satu puskesmas. Artinya, pemerintah Kabupaten Kaur telah berupaya untuk melakukan pemerataan pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan. Namun, untuk setiap kecamatan, belum seluruhnya telah memiliki dokter (Kabupaten Kaur Dalam Angka 2014).

3.4 Kesehatan Lingkungan

Upaya penanggulangan penyakit tidak hanya melibatkan *agent* (penyebab sakit) dan *host* (manusia) semata, melainkan juga faktor lingkungan yang ternyata berperan sangat besar. Telah lama disinyalir bahwa peran lingkungan dalam meningkatkan derajat kesehatan sangat besar. Sumber daya alam sebagai lingkungan fisik yang ada selama ini dipergunakan bagi kelangsungan hidup manusia memiliki sifat *irreversible* (tidak mungkin berkembang), sedangkan jumlah penduduk semakin lama semakin meningkat. Laju pertumbuhan yang cukup cepat, hingga kini selalu memunculkan masalah, tidak saja pada masalah ekonomi, sosial, budaya, namun juga berdampak pada permasalahan lingkungan seperti ketersediaan air yang sehat dan bersih dan peningkatan kadar polusi udara, laut, maupun darat berupa sampah. Untuk melihat rendahnya tingkat sanitasi lingkungan sebagai standar utamanya dapat diperhatikan dari berbagai sarana penunjang kesehatan yang berada di lingkungan rumahtangga, baik dilihat dari kondisi perumahan, sumber air bersih, fasilitas buang air besar, termasuk fasilitas buang sampah.

Jenis lantai memiliki pengaruh besar terhadap kondisi kesehatan penghuninya. Data pada Tabel 4 menunjukkan, bahwa masih cukup besar penduduk di Kabupaten Kaur yang masih tinggal di rumah berlantai tanah, meskipun

Sebanyak 4,68 persen rumah di Kabupaten Kaur masih berlantai tanah dan 43,22 persen rumah tangga menggunakan sumur tidak terlindung sebagai sumber air minum.

persentasenya selalu menurun. Pada tahun 2008, persentase rumah yang berlantai tanah masih 18,48 persen, dan pada tahun 2014 telah menurun menjadi 4,68 persen. Kondisi rumah yang berlantai tanah berpotensi sebagai penyebab gangguan kesehatan. Lantai yang lembab merupakan sarana yang baik bagi sekumpulan mikroorganisme untuk berkembang biak yang pada akhirnya merupakan sumber penyakit. Lantai tanah yang lembab juga berpotensi untuk menjadi sarana penyebaran penyakit cacangan. Sementara pada saat kering, lantai tanah akan menjadi berdebu yang akan mengganggu pernafasan.

Tabel 4.

Indikator Kesehatan Lingkungan Berdasarkan Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Lantai dan Fasilitas Air Minum di Kabupaten Kaur Tahun 2014

Indikator (1)	Persentase (2)
Jenis Lantai	
- Tanah	4,68
- Bukan Tanah	95,32
Sumber Air Minum Utama	
- Air Kemasan	0,43
- Air Isi Ulang	5,68
- Ledeng Meteran	1,78
- Ledeng Eceran	0,20
- Pompa	2,59
- Sumur Terlindung	29,33
- Sumur Tak Terlindung	43,22
- Mata Air Terlindung	3,09
- Mata Air Tak Terlindung	4,56
- Air Sungai	9,12
- Lainnya	0,00
Fasilitas Buang Air Besar	
- Sendiri	69,79
- Bersama	22,77
- Umum	5,42
- Tidak Ada	2,03

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2014

Air minum yang bersih merupakan syarat yang penting bagi kesehatan manusia. Rendahnya kualitas air yang diminum

menyebabkan bakteri penyakit mudah masuk ke dalam tubuh. Kualitas air minum sendiri dapat diketahui dari bentuk dan rasa air, di mana terdapat lima tingkatan kualitas air yang sering dijadikan tolok ukur yaitu jernih, berwarna, berasa, berbusa, dan berbau. Data BPS di atas menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Kabupaten Kaur (43,22 persen) yang menggunakan sumur tidak terlindung sebagai sumber air minum, bahkan 9,12 persen masih menggunakan air sungai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesehatan lingkungan penduduk Kabupaten Kaur masih perlu terus ditata.

Penggunaan sumur tidak terlindung sebagai sumber air minum, membuka peluang terjadinya pencemaran baik secara organik, seperti bakteri *Escherichia coli*, *Coliform*, bahkan *Salmonella*, maupun anorganik seperti sisa-sisa *detergent*, pestisida, dan sebagainya. Semua jenis pencemaran tersebut membawa efek terhadap gangguan kesehatan penduduk yang mengkonsumsi air tersebut. Terlebih bila masih ada kebiasaan buang air besar tidak pada tempatnya. Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa masih ada 0,85 persen rumah tangga di Kabupaten Kaur tidak memiliki sarana buang air besar. Angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya.

Masih banyak lagi problematika kesehatan yang muncul dan perlu segera dibenahi akibat perubahan sosial ekonomi dan budaya, antara lain; terjadinya disparitas status kesehatan; beban ganda penyakit; kinerja pelayanan kesehatan yang rendah; perilaku dan pola hidup bersih masyarakat yang kurang mendukung; rendahnya kondisi kesehatan lingkungan; rendahnya kualitas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata; dan rendahnya kesehatan penduduk miskin.

<http://kaurkab.bps.go.id>

<http://kaurkab.bps.go.id>

Bab 4 **Kemajuan Pembangunan** **Manusia Kabupaten Kaur** **Tahun 2014**

KEMAJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KAUR TAHUN 2014

Hakekat pembangunan manusia adalah pembangunan manusia seutuhnya, yang intinya adalah peningkatan kualitas hidup yang tercakup di dalamnya adalah kualitas sumber daya manusia. Pembangunan manusia seutuhnya selama ini telah diimplementasikan pemerintah melalui pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan tersebut diharapkan akan lebih menyentuh sasaran. Keberhasilannya akan tercermin dari seberapa jauh terjadinya perubahan dari kualitas hidup penduduknya. Salah satu instrumen untuk mengukur keberhasilan tersebut adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pencapaian kualitas pembangunan manusia tidak hanya dilihat dari perubahan skor IPM, tetapi juga harus memperhatikan perubahan pada determinan yang mempengaruhinya.

Untuk mengevaluasi seberapa besar peningkatan kualitas pembangunan manusia, tidak hanya dilihat dari seberapa besar perubahan skor IPM-nya, karena skor tersebut hanya memvisualisasikan kondisi secara umum dari tiga komponen indikator pembentuk IPM. Penelaahan lebih dalam terhadap masing-masing komponen akan memberikan gambaran yang lebih jelas lagi indikator mana saja yang memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan skor IPM tersebut. Bahkan akan lebih baik lagi kalau dapat dianalisis pada determinan dari masing-masing indikator, sehingga akan data diketahui akar permasalahannya.

Tabel 5 berikut, menyajikan beberapa determinan dari tiga indikator IPM, baik yang memberikan dampak langsung, secara

tidak langsung, maupun sebab mendasar terhadap terjadinya perubahan masing-masing indikator.

Tabel 5.
Diagram Analisis Situasi Pencapaian Pembangunan Manusia

DETERMINAN	INDIKATOR		
	Harapan Hidup (Angka Kematian Bayi)	Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah)	Daya Beli (Konsumsi Perkapita)
Sebab Langsung	- Persentase penolong persalinan oleh tenaga medis masih rendah	- Tingkat partisipasi sekolah usia 13-18 tahun masih rendah	- Tingkat upah/pendapatan rendah
Sebab Tidak Langsung	- Pemeriksaan antenatal - Status gizi ibu hamil	- Fasilitas pendidikan kurang - Biaya pendidikan mahal	- Kesempatan kerja kurang - Produktifitas rendah - Kualitas SDM rendah
Sebab Mendasar	- Kemiskinan - Tingkat Pendidikan Rendah	- Kemiskinan	- Perluasan lapangan kerja dan usaha - Pembinaan terhadap UMKM

Selama empat tahun terakhir IPM Kabupaten Kaur selalu meningkat. Pada tahun 2009 IPM Kabupaten Kaur tercatat sebesar 69,21. Pada tahun 2010 IPM kembali meningkat menjadi 69,99, tahun 2011 menjadi 70,43, tahun 2012 menjadi 71,13 dan tahun 2013 meningkat menjadi 71,54. Pada tahun 2014, IPM Kabupaten Kaur sebesar 70,00. Khusus tahun 2014, perhitungan IPM sudah menggunakan metode baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan IPM tahun-tahun sebelumnya.

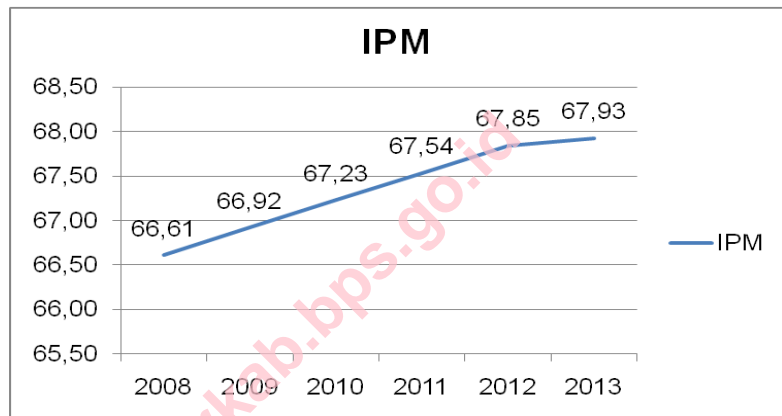
Selama empat tahun terakhir, kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Kaur menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana ditunjukkan oleh perkembangan IPM wilayah ini. Pada tahun 2009 IPM Kabupaten Kaur tercatat sebesar 69,21. Pada tahun 2010 IPM kembali meningkat menjadi 69,99, tahun 2011 menjadi 70,43, tahun 2012 menjadi 71,13 dan tahun 2013 meningkat menjadi 71,54. Pada tahun 2014, IPM Kabupaten Kaur sebesar 70,00. Khusus tahun 2014, perhitungan IPM sudah menggunakan metode baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan IPM tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan IPM, juga tercermin dari peningkatan komponen pendukungnya yang menunjukkan adanya perbaikan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan kemampuan ekonomi. Perbaikan pembangunan kesehatan, tercermin dari

meningkatnya Angka Harapan Hidup dari 66,92 pada 2009 berturut-turut meningkat menjadi 67,23 (2010), 67,54 (2011), 67,85 (2012), 67,93 (2013) dan pada tahun 2014 mencapai 67,93.

Peningkatan IPM juga diikuti oleh peningkatan indeks masing-masing komponen.

Gambar 3.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kaur Tahun 2009-2014



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Peningkatan di bidang pendidikan, ditandai dengan semakin berkurangnya penduduk yang buta huruf dan bertambahnya rata-rata lama sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kaur menurun dari 97,37 persen pada tahun 2013 menjadi 95,28 persen pada tahun 2014. Komponen rata-rata lama sekolah juga menunjukkan penurunan. Bila pada tahun 2012 pada angka 8,15 tahun, maka pada tahun 2014 menurun menjadi 7,90 tahun.

Perbaikan ekonomi yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengeluaran perkapita yang disesuaikan menggunakan *Purchasing Power Parity*. Pengeluaran perkapita secara umum terus mengalami peningkatan dari 609,29 ribu rupiah pada tahun 2009, berturut-turut meningkat menjadi 610,84 ribu rupiah (2010), 613,14 ribu rupiah (2011), 615,69

ribu rupiah (2012) dan 619,56 ribu rupiah (2013) dan menurun menjadi 610,21 ribu rupiah pada tahun 2014.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa IPM merupakan tingkat kesenjangan antara apa yang sudah dicapai oleh suatu daerah dengan kondisi ideal (IPM = 100). Artinya bila IPM Kabupaten Kaur berada pada nilai 71,54 masih mengalami kesenjangan 28,46 poin lagi untuk mencapai kondisi ideal. Laporan BPS menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2014, kesenjangan tersebut telah tereduksi sebesar 1,42 poin berdasarkan metode reduksi *shortfall*.

Reduksi *shortfall* mengasumsikan bahwa laju perubahan IPM tidak linier, tetapi akan semakin melambat pada nilai IPM yang lebih tinggi. Reduksi *shortfall* yang rendah menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia cenderung lambat dan membutuhkan semakin lama waktu untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Bila Kabupaten Kaur menargetkan pencapaian IPM sebesar 80 (nilai IPM yang dikategorikan tinggi), sementara reduksi *shortfall* hanya berada pada kisaran 2,37 poin seperti yang terjadi saat ini, maka dibutuhkan waktu lama untuk mencapai nilai 80 tersebut.

Untuk diketahui, bahwa berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh UNDP, tingkat pencapaian IPM dikategorikan dengan standar sebagai berikut :

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia)
< 60	Rendah
$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Atas dasar kriteria tersebut, maka IPM Kabupaten Kaur pada tahun 2014 ini termasuk dalam kategori tinggi.

<http://kaurkabps.go.id>

Bab 5

Perbandingan IPM Kabupaten Kaur dengan Kabupaten Lain

POSISI PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KAUR DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014

*IPM Provinsi
Bengkulu Tahun 2012
sebesar 73,94.
Diantara sepuluh
kabupaten/kota, IPM
tertinggi terjadi di
Kota Bengkulu
(78,51) dan terendah
di Kabupaten Seluma
(67,69). IPM
Kabupaten Kaur
sebesar 71,13
menempati posisi
keenam.*

Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai IPM, memberi indikasi semakin tingginya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan akan berpengaruh terhadap kemajuan daerah tersebut. Secara umum, pencapaian IPM Provinsi Bengkulu pada tahun 2014 sebesar 74,41, namun pada tingkat kabupaten/kota angkanya bervariasi. IPM tertinggi terjadi di Kota Bengkulu mencapai 78,77, sedangkan IPM terendah ada di Kabupaten Seluma sebesar 68,40, sedangkan Kabupaten Kaur mencapai IPM sebesar 71,54 menempati peringkat ketujuh setelah Kota Bengkulu (78,77), Bengkulu Utara (73,67), Bengkulu Selatan (73,66), Rejang Lebong (72,63), Mukomuko (71,79) dan Lebong (71,58). Peringkat IPM Kabupaten Kaur sendiri mengalami penurunan bila dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya.

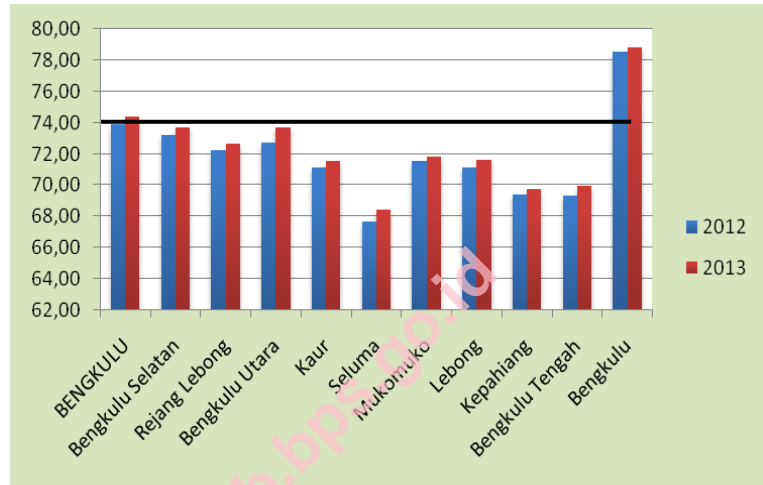
Selain itu, akselerasi pembangunan manusia di masing-masing kabupaten/kota memiliki tingkat yang berbeda-beda. Dengan menggunakan ukuran reduksi *shortfall*, Kabupaten Bengkulu Utara tercatat memiliki akselerasi pembangunan manusia yang paling cepat. Reduksi *shortfall*-nya mencapai 3,39. Sementara itu, akselerasi pembangunan manusia di Kabupaten Kaur Tahun 2014 justru sebaliknya. Berdasarkan

nilai reduksi *shortfall*-nya tercatat 1,42, menurun dari nilai reduksi *shortfall* tahun sebelumnya, yakni 2,37.

Gambar 4.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2014

Kurun 2013-2014, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan IPM. Akselerasi peningkatan IPM tertinggi di Kabupaten Bengkulu Utara.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Percepatan pembangunan manusia, yang tercermin dari angka IPM, ditentukan oleh komponen yang mendasarinya, yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Daya Beli (*Purchasing Power Parity/PPP*).

5.1 Angka Harapan Hidup

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar setiap lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat. Untuk itu, pemerintah telah membangun berbagai sarana dan prasarana kesehatan, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), dan sebagainya. Disamping tu juga dibangun infrastruktur pendukung kesehatan masyarakat seperti

sarana air bersih, MCK, rumah sehat, dan sebagainya. Sedangkan untuk melayani kesehatan masyarakat, pemerintah juga telah menyediakan dokter, perawat, bidan, paramedis lain, bahkan memberikan pelatihan kesehatan kepada kader posyandu dan dukun bersalin. Selain itu, bagi masyarakat miskin, pemerintah juga telah mengadakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal), yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mencegah kematian bayi dan ibu akibat persalinan, yang pada akhirnya akan terlihat dari indikator Angka Harapan Hidup (AHH).

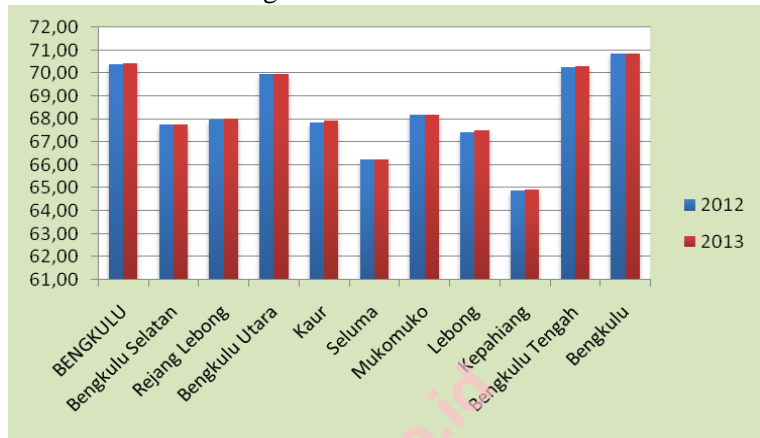
*Angka Harapan
Hidup (AHH)
merupakan indikator
pembangunan bidang
kesehatan.*

Secara umum, AHH di Provinsi Bengkulu tahun 2014 adalah 70,44 tahun, meningkat dibandingkan AHH tahun 2013 yang tercatat sebesar 70,44 tahun. AHH tertinggi adalah di Kota Bengkulu (70,86 tahun) sedangkan yang terendah di Kabupaten Kepahiang (64,93 tahun). Sementara Kabupaten Kaur mencatat pencapaian AHH sebesar 67,93 tahun.

*AHH Provinsi
Bengkulu Tahun 2013
sebesar 74,41 tahun.
AHH Kabupaten Kaur
67,93 tahun.*

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Angka Harapan Hidup (AHH) yang digunakan sebagai indikator IPM adalah Angka Harapan Hidup Nol Tahun (AHH₀), yaitu rata-rata lamanya hidup yang mungkin dicapai oleh penduduk sejak usia nol tahun. Angka ini mempunyai hubungan terbalik dengan Angka Kematian Bayi (AKB), artinya apabila terjadi angka kematian bayi, maka akan terjadi peningkatan terhadap Angka Harapan Hidup. Karena itulah, pencapaian AHH ditentukan oleh determinan yang mempengaruhi AKB, misalnya persentase penolong persalinan oleh tenaga medis, pemeriksaan antenatal, status gizi ibu hamil, dan sebagainya.

Gambar 5.
Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Bengkulu Tahun 2013-2014



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Gambar 5 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan AHH dalam kurun waktu 2013-2014. Kabupaten Kaur adalah kabupaten yang mengalami peningkatan AHH tertinggi, diikuti Kabupaten Lebong. Fakta ini menunjukkan kondisi yang relatif baik meski masih perlu ditingkatkan. Sementara Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara adalah dua kabupaten dengan peningkatan AHH terendah.

5.2 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Sekolah

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia sehingga menentukan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas akan membentuk manusia yang bermutu, handal, memiliki wawasan luas, dan berpandangan jauh ke depan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin baik kualitas sumber daya manusianya.

Dalam penghitungan IPM, komponen pendidikan (*knowledge*) diukur dari kombinasi Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah bagi penduduk berusia 10 tahun ke atas (MYS). Kedua komponen ini dihitung dari Susenas, yaitu dari variabel kemampuan baca tulis dan kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Untuk memperoleh nilai Indeks Pendidikan, AMH diberi bobot 1/2 sedangkan MYS diberi bobot 1/2.

Gambar 6.
Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2014



Indikator Pendidikan terdiri dari Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS).

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Rata-rata AMH kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu telah di atas angka 90 persen.

Gambar 6 menunjukkan bahwa AMH di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, rata-rata telah relatif tinggi, di atas 90 persen. Bahkan AMH di Kota Bengkulu telah mencapai 99,44 persen. Selain itu, dalam kurun 2012-2013 seluruh kabupaten/kota juga mengalami peningkatan AMH. Berdasarkan data di atas, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki peningkatan AMH tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya, yakni 1,87. Sementara itu, AMH Kabupaten Kaur meningkat relatif kecil, yakni hanya sebesar 0,29. Sedangkan kabupaten dengan peningkatan AMH terendah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MYS di Provinsi Bengkulu tahun 2013 mencapai 8,55 tahun, hanya dua Kabupaten/kota yang MYS-nya diatas 8 tahun, yaitu Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan

Indikator lain yang menjadi komponen indeks Pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Pada tahun 2013, angka MYS di tingkat Provinsi Bengkulu adalah 8,55 tahun atau setingkat SLTP kelas 2. Hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang MYS-nya melebihi angka MYS provinsi. MYS Kota Bengkulu tercatat sebesar 11,26 tahun atau setingkat dengan kelas 2 SLTA dan MYS Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai 9,05 tahun atau setara dengan SLTP kelas 3. Kabupaten lain angka MYS-nya berada pada kisaran 7 tahun dan 8 tahun, atau setara dengan kelas 1 dan kelas 2 SLTP.

Angka MYS di Kabupaten Kaur pada tahun 2013 mencapai 8,17 tahun. Angka ini tidak mengalami perubahan dibandingkan MYS tahun 2012. Dibandingkan kabupaten lain, MYS Kabupaten Kaur relatif lebih baik. Posisinya berada nomor tiga tertinggi setelah Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Gambar 7.
Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2014



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

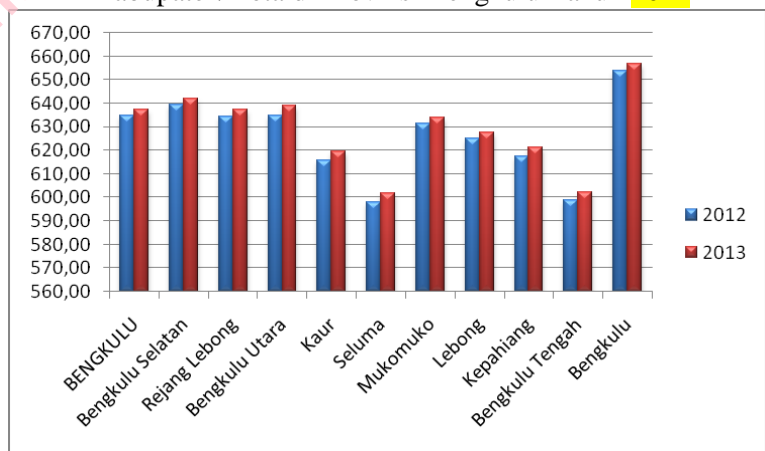
5.3 Daya Beli (*Purchasing Power Parity*)

Daya beli mencerminkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya. Dalam konteks pembangunan manusia, indikator daya beli merupakan indikator kesejahteraan penduduk. Bila daya beli meningkat, dapat diasumsikan bahwa kesejahteraan penduduk juga semakin baik.

Indikator daya beli mencerminkan kesejahteraan penduduk. Indikator ini menggunakan pendekatan pengeluaran riil perkapita yang telah disesuaikan.

Konsep daya beli pada IPM menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga. Konsep ini berbeda dengan PDRB perkapita atau *income perkapita*, karena PDRB atau *income perkapita* bukan merupakan konsumsi riil rumahtangga. Mengingat bahwa daya beli berkaitan dengan nilai tukar terhadap barang, maka dalam konsep ini daya beli menggunakan pendekatan pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan (*Purchasing Power Parity*).

Gambar 8.
Pengeluaran Riil Perkapita yang Telah Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2014



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Secara umum pengeluaran riil per kapita di Provinsi Bengkulu tahun 2013 mencapai Rp 637.400,00. Pengeluaran

Pengeluaran riil perkapita Provinsi Bengkulu sebesar Rp 634.740,00.

Pengeluaran riil perkapita Kabupaten Kaur sebesar Rp 615.690,00.

Peningkatan pengeluaran riil menunjukkan adanya peningkatan perekonomian masyarakat.

riil tertinggi adalah di Kota Bengkulu sebesar Rp 656.600,00 dan yang terendah di Kabupaten Seluma sebesar Rp 601.600,00 sedangkan posisi Kabupaten Kaur berada dalam urutan ketujuh dengan pengeluaran riil perkapita sebesar Rp 619.500,00. Angka ini telah meningkat dibandingkan kondisi tahun 2012 yang tercatat pengeluaran riil perkapita sebesar Rp 615.600,00.

Gambar 8 memperlihatkan bahwa dalam kurun 2012-2013, pengeluaran riil per kapita masing-masing kabupaten/kota telah mengalami peningkatan. Mengingat bahwa indikator ini dimaksudkan sebagai gambaran tingkat hidup layak atau kesejahteraan masyarakat, dapat diartikan bahwa kurun 2012-2013, kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu relatif telah mengalami peningkatan.

Peningkatan pengeluaran riil per kapita menunjukkan adanya peningkatan perekonomian masyarakat. Kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah adanya pertumbuhan ekonomi, tersedianya kesempatan kerja, pendapatan yang semakin merata, serta keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.

Bab 6

Kesimpulan dan Saran

<http://karkab.bps.go.id>

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Pembangunan manusia di Kabupaten Kaur telah menunjukkan keberhasilan, yang ditunjukkan oleh angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang selalu meningkat setiap tahun, dari 67,99 pada tahun 2007 menjadi 71,54 pada tahun 2014.
2. Pencapaian IPM Kabupaten Kaur sebesar 71,54 tersebut menempati peringkat ketujuh diantara pencapaian IPM kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi Bengkulu, dan merupakan yang tertinggi ketiga diantara kabupaten pemekaran setelah Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Lebong.
3. Pencapaian IPM dibentuk dari komponen pendukungnya yang meliputi Angka Harapan Hidup (AHH) 67,93 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) 95,28 persen, Rata-rata Lama Sekolah (MYS) 7,90 tahun, dan Pengeluaran Riil Perkapita Rp 610.218,00.
4. Dengan nilai IPM 71,54, kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Kaur termasuk ke dalam kelompok menengah ke atas.

6.2 Saran

1. Untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup, yang merupakan determinasi dari penurunan Angka Kematian Bayi, Pemerintah Kabupaten Kaur perlu lebih meningkatkan program kesehatan ibu dan bayi, memperluas pelayanan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu khususnya untuk pelayanan persalinan, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk penyediaan tenaga medis yang memadai.
2. Perlu upaya lebih besar untuk pemberantasan buta aksara, khususnya terhadap 4,72 persen masyarakat yang masih buta huruf, sehingga Kabupaten Kaur terbebas dari buta aksara. Selain itu perlu kesadaran pentingnya pendidikan sehingga program Wajib Belajar 9 tahun dapat terlaksana sepenuhnya, serta menyelenggarakan pendidikan yang berazas pemerataan dan keterjangkauan, dengan tetap mengacu kepada standar pendidikan nasional.
3. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat merupakan program yang perlu diprioritaskan, melalui penciptaan dan perluasan pasar bagi produk unggulan bagi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) untuk menekan angka pengangguran. Selain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, penciptaan lapangan kerja, juga merupakan upaya pengurangan angka kemiskinan.

LAMPIRAN TABEL

<http://korkab.bps.go.id>

Tabel 6.
Indikator IPM dan Nilai IPM Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu
Tahun 2014

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM		Peringkat IPM	
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)					
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1700	BENGKULU	70,39	70,44	95,69	96,55	8,48	8,55	634,74	637,50	73,93	74,41	11	11
1701	Bengkulu Selatan	67,77	67,77	96,54	96,57	8,67	9,05	639,61	642,13	73,18	73,66	2	3
1702	Rejang Lebong	67,98	68,03	95,74	96,32	8,01	8,02	634,20	637,51	72,21	72,63	4	4
1703	Bengkulu Utara	69,97	69,97	93,54	95,41	7,84	8,10	634,75	638,82	72,74	73,67	3	2
1704	Kaur	67,85	67,93	97,08	97,37	8,17	8,17	615,69	619,56	71,13	71,54	6	7
1705	Seluma	66,25	66,26	94,09	95,46	7,46	7,63	598,07	601,69	67,69	68,40	10	10
1706	Mukomuko	68,17	68,17	94,10	94,40	7,74	7,74	631,29	633,86	71,53	71,79	5	5
1707	Lebong	67,43	67,49	95,56	96,70	7,93	7,95	625,28	627,40	71,12	71,58	7	6
1708	Kepahiang	64,88	64,93	96,41	96,56	8,10	8,10	617,40	621,20	69,41	69,76	8	9
1709	Bengkulu Tengah	70,27	70,28	91,91	92,63	7,26	7,47	598,86	602,25	69,35	69,93	9	8
1771	Bengkulu	70,84	70,86	99,32	99,44	11,26	11,26	653,78	656,70	78,51	78,77	1	1

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://kaurkab.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KAUR

Jl. Peltu M. Ilyas T. Panji Alam Padang Kempas Bintuhan
Telp. (0739) 6180009-10, Fax. (0739) 6180002
Homepage://kaurkab.bps.go.id Email:bps1704@bps.go.id